

Inovasi di Kabupaten Muara Enim

Kategori : Pelayanan Publik Inklusif untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat
Tanggal Submit: 30 Maret 2018

Amnesti Tangki Septik Bocor

Amnesti Tangki Septik Bocor merupakan program unggulan pemerintah kabupaten (pemkab) Muara Enim. Inovasi ini didasarkan atas prinsip “*yang mencemar harus membayar, yang sesuai aturan diberi insentif*” sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Tujuannya meningkatkan akses sanitasi layak. Sasarannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Inovasi ini menjadi jawaban terhadap permasalahan sanitasi. Khususnya dalam hal pengelolaan air limbah domestik, lumpur tinja, dan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di kalangan masyarakat.

Sebelum adanya inovasi ini, masyarakat yang menggunakan tangki septik sekitar 56 persen. Sebanyak 82,9 persen masyarakat bahkan tidak pernah menguras tangki septiknya. Dan 35,6% masyarakat memiliki tangki septik yang tidak aman. Nah, tangki septik yang tidak pernah dikuras berpotensi bocor, mencemari air dan tanah.

Belum lagi 48 persen penduduk masih buang air besar sembarangan. Survei *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) menemukan bahwa selain ke jamban pribadi, orang dewasa juga BAB ke sungai, kebun/ pekarangan, WC helikopter, selokan, parit, dan lubang galian.

Hasil studi EHRA lainnya, dari 1.170 rumah tangga di 26 desa/ kelurahan, yang punya saluran pembuangan air limbah sekitar 61 persen. Sedangkan 39 persen tidak ada. Terjadi pencemaran karena limbah sampah dan tinja rumah tangga sebanyak 54,6 persen. Dampaknya, angka kesakitan yang diakibatkan oleh penyakit berbasis air (*waterborne diseases*) meningkat.

Angka kesakitan untuk Diare di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 sebanyak 15.281 kasus. Dari permasalahan pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja tersebut, diperlukan upaya percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai universal akses pada tahun 2019.

Awal 2017, pemerintah kabupaten (pemkab) Muara Enim melakukan inovasi program Amnesti Tangki Septik Bocor (ATSB). Semula dilaksanakan di tiga kecamatan. Kemudian direplikasi pada dua kecamatan lain. Lima kecamatan itu yakni Muara Enim, Lawang Kidul, Ujan Mas, Benakat, dan Gunung Megang

Untuk keberlanjutan program itu, pemkab sudah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup besar. Dalam APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2017 dialokasikan Rp1,5 miliar untuk pengadaan tangki septic. Termasuk biaya sosialisasi kepada perangkat daerah dan sosialisasi di tingkat kecamatan, honor kader kesehatan, kampanye inovasi di media massa dan radio serta pelatihan kader kesehatan.

Dalam APBDes tahun 2017 dialokasikan Rp Rp.75.000.000 untuk pembangunan WC umum di 15 (lima belas) desa. Kemudian menyusun raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selain itu, mengadakan MoU dengan Baznas yang akan memberikan bantuan

jamban sehat. Juga menjalin komitmen dengan PT Bukit Asam Tbk untuk membantu pembiayaan inovasi melalui CSR.

Dibentuk juga kelompok kerja (pokja) air minum dan sanitasi. Anggotanya dari beberapa perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup. Pokja ini mendapatkan bantuan teknis dari *Urban Sanitation Development Program (USDP)* yang memberikan *assesment* terhadap permasalahan sanitasi di Muara Enim.

Pemkab memberikan *rewards* dan *punishment* bagi masyarakat yang melaporkan kebocoran tangki septiknya. *Reward* yang diberikan berupa subsidi penggantian satu paket tangki septik dan penyedotan tinja gratis untuk periode tiga tahun pertama. Tak hanya MBR, pemkab juga berikan kesempatan kepada masyarakat non MBR untuk mendaftarkan dan melakukan penyedotan tinja sesuai biaya retribusi yang ditetapkan dalam perda.

Keberhasilan inovasi ini terlihat jelas. Kepemilikan jamban sehat permanen (JSP) meningkat. Dari Desember 2015 sebanyak 14.928 JSP menjadi 16.449 JSP di Desember 2017. Telah dibangun 500 tangki septik untuk MBR di tiga kecamatan. Lalu, meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, akses jamban sehat, dan tersedianya tangki septik aman dari sebelumnya sebesar 61,13 persen menjadi 72,08 persen pada 2017.

Meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m³/hari menjadi lebih dari 10 m³/hari. Pemantauan pelaksanaan inovasi ini dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa/lurah, kecamatan, OPD terkait hingga sampai ke Sekda. Hasil evaluasi lalu dilaporkan kepada bupati setiap enam bulan sekali.

Kini, ketidakadaan data awal yang valid mengenai rumah tangga MBR teratasi dengan pendataan yang melibatkan kader kesehatan dan ASN dalam pelaksanaan inovasi ini. Muncul harapan lain masyarakat. Yakni meminta bantuan penyediaan jamban/kloset karena harganya cukup mahal bagi MBR. Aspirasi ini telah diakomodir dengan menganggarkan dana dalam APBD 2018 untuk penyediaan jamban/ kloset.

Dampak positif dari inovasi ini yaitu berubahnya perilaku dan pola hidup masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat. Kemudian, meningkatnya kesadaran masyarakat akan tangki septik sehat, dan kewajiban menguras tanki septik secara berkala. Secara kesehatan, angka kesakitan diare di kalangan masyarakat miskin berkurang. Begitu juga dengan pencemaran lingkungan. (*)

AMNESTI TANGKI SEPTIK BOCOR KABUPATEN MUARA ENIM

Kategori : Pelayanan Publik Inklusif Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Tanggal Submit : 30 Maret 2018

RINGKASAN

Amnesti Tangki Septik Bocor merupakan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memastikan MBR sebagai kelompok masyarakat rentan mendapatkan akses sanitasi aman.

Inovasi ini menjadi jawaban terhadap permasalahan sanitasi Kabupaten Muara Enim yaitu dalam hal pengelolaan air limbah domestik, lumpur tinja, dan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di masyarakat yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kepala Bappeda melontarkan ide awal inovasi dalam rapat pokja air minum dan sanitasi yaitu memberikan bantuan penggantian tangki septik berstandar SNI dan penyedotantinja gratis bagi MBR.

Pelaksanaan inovasi melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan dilakukan FGD secara intensif dan penyusunan Peraturan Bupati yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan *launching* inovasi amnesti tangki septik bocor diikuti sosialisasi dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan, kampanye melalui media cetak dan radio, serta penyusunan *database* sanitasi untuk menentukan zona prioritas. Selanjutnya kader kesehatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan survei *by name by address* dan pendataan calon penerima manfaat.

Keberhasilan inovasi ini yaitu meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, akses jamban sehat, dan tersedianya tangki septik aman dari sebelumnya sebesar 61,13% menjadi 72,08% pada tahun 2017 dan meningkatnya kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) pada bulan Desember Tahun 2015 sebanyak 14.928 JSP meningkat menjadi 16.449 JSP pada bulan Desember 2017.

Inovasi awalnya dilaksanakan di 3 Kecamatan dan telah direplikasi di 2 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Muara Enim. Pemerintah Daerah berkomitmen dengan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk keberlanjutan program dan sedang menyusun Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selain itu telah ditandatangani MoU dengan Baznas yang akan memberikan bantuan jamban sehat serta komitmen dari PT. Bukit Asam, Tbk untuk membantu pembiayaan inovasi melalui Dana CSR.

A. Analisis Masalah (5%)

1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi? (Maksimal 500 kata)

Kabupaten Muara Enim terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan Jumlah penduduk sebanyak 600.398 orang. Sejak tahun 2008 hingga 2016 Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat program penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan salah satu prioritas nasional di bidang pembangunan daerah sesuai dengan target universal akses dalam RPJMN yang dikenal dengan istilah 100 - 0 -100, dimana

100% untuk akses air minum, 0% untuk kawasan kumuh dan 100% untuk akses sanitasi. Salah satu target akses universal yang perlu mendapat perhatian khusus bagi daerah adalah membangun **sanitasi layak** bagi masyarakat.

Di Kabupaten Muara Enim akses sanitasi layak sampai dengan tahun 2016 sebesar 70,46% dengan laju pertumbuhan 3,50% selama 5 (lima) tahun. Angka ini sudah di atas angka akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 64,51% namun target minimal sampai dengan tahun 2019 adalah 88% sehingga masih ada gap sebesar 17,54%. Adapun komponen sanitasi yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja di tingkat rumah tangga dan daerah.

Air limbah domestik berasal dari kamar mandi, tempat cuci pakaian, maupun dari dapur. Rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dapat menyebabkan terjadinya genangan disekitar rumah. Sebagai bagian dari penyusunan rencana strategi pembangunan sanitasi di dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Pemerintah Daerah melakukan survei *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA). Hasil studi EHRA yang dilakukan terhadap 1.170 rumah tangga di 26 Desa/ Kelurahan pada Kabupaten Muara Enim menunjukkan masyarakat rumah tangga yang memiliki saluran pembuangan air limbah sekitar 61% sedangkan 39% tidak memiliki.

Untuk saluran akhir pembuangan tinja yang paling banyak digunakan adalah tangki septik sebesar 56%. Sebanyak 82,9% masyarakat tidak pernah menguras tangki septiknya dan sebanyak 35,6% masyarakat memiliki tangki septik tidak aman. Tangki septik yang tidak pernah dikuras akan menyebabkan kebocoran sehingga dapat mencemari lingkungan terutama air dan tanah.

Selain itu masih ada perilaku masyarakat yang tingkat kesadarannya rendah yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) mencapai 48% penduduk. Survei EHRA menemukan bahwa selain ke jamban pribadi orang dewasa juga BAB ke sungai, kebun/ pekarangan, WC helikopter, selokan, parit, dan lubang galian.

Hasil studi juga menunjukkan terjadi pencemaran Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) di masyarakat karena limbah sampah dan tinja rumah tangga sebanyak 54,6%. Kondisi air limbah memiliki dampak terhadap peningkatan angka kesakitan yang diakibatkan oleh penyakit berbasis air (*waterborne diseases*). Kejadian penyakit diare sering ditemukan pada musim penghujan akibat bahan pencemar masuk ke badan air dan tanah melalui rembesan air hujan. Angka kesakitan untuk Diare di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 sebanyak 15.281 kasus.

Dari permasalahan pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja tersebut maka diperlukan upaya percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai universal akses pada tahun 2019. Pada awal tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Muara Enim merilis inovasi program Amnesti Tangki Septik Bocor (ATSB) sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja. Kelompok sasaran kegiatan inovasi ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jamban sehat.

B. Pendekatan Strategis (20%)

2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut? (Maksimal 600 kata)

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membentuk Pokja air minum dan sanitasi untuk mendukung kebijakan nasional pengelolaan air minum dan sanitasi. Pokja air

minum dan sanitasi terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait antara lain Bappeda, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup. Pokja air dan sanitasi mendapatkan bantuan teknis dari *Urban Sanitation Development Program (USDP)* dalam melakukan *assesment* terhadap permasalahan sanitasi di Kabupaten Muara Enim. Dalam rapat Pokja kemudian disepakati suatu inovasi yang ide awalnya dilontarkan oleh Kepala Bappeda sebagai upaya penyelesaian masalah pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja. Inovasi ini dikenal dengan amnesti tangki septik bocor.

Inovasi ini didasarkan atas prinsip “*yang mencemar harus membayar, yang sesuai aturan diberi insentif*” sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pendekatan strategis yang dilakukan dalam pelaksanaan inovasi yaitu :

1. Memberikan *rewards* dan *punishment* bagi masyarakat yang melaporkan tangki septiknya. *Reward* yang diberikan berupa subsidi penggantinya satu paket tangki septik dan penyedotan tinja gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini dilakukan untuk memastikan akses sanitasi yang aman juga dapat dinikmati oleh MBR sebagai kelompok masyarakat rentan.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat non MBR untuk mendaftarkan dan melakukan penyedotan tinja sesuai biaya retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
3. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat sehingga diperoleh kesamaan persepsi dalam pelaksanaan inovasi.
4. Mengintensifkan advokasi dan sosialisasi terkait inovasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang akan meningkatkan kepedulian semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengelolaan air limbah secara aman dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.
5. Optimalisasi IPLT (Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja). Lumpur tinja yang disedot secara berkala akan diangkut ke IPLT dan diolah agar aman dibuang ke lingkungan.

3. Dalam hal apa inovasi kreatif dan inovatif? (Maksimal 200 kata)

Inovasi ini kreatif dan inovatif yang ditunjukkan oleh:

1. Pemberian perlindungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini menjadi kelompok rentan yang sulit mendapatkan akses bagi pelayanan publik terkait pengelolaan air limbah. MBR yang tidak memiliki jamban sehat diberikan bantuan penggantinya satu paket tangki septik dan penyedotan tinja gratis untuk periode 3 tahun pertama.
2. Dalam pelaksanaannya mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari multipihak sehingga menimbulkan sinergitas pendanaan. Sumber-sumber pendanaan mencakup pendanaan APBD, APBDes dan Baznas.
3. Kampanye pelaksanaan inovasi menggunakan media promosi seperti koran dan radio, pemasangan baliho dan spanduk secara berkala, distribusi materi cetak seperti stiker, edaran dan brosur edukasi masyarakat.

4. Pendataan kepemilikan tangki septik dilakukan oleh kader kesehatan menggunakan kuesioner dan pendataan oleh ASN menggunakan aplikasi android sehingga data yang didapat lebih akurat.

C. Pelaksanaan dan Penerapan (35%)

4. Bagaimana pelaksanaan inovasi? (Maksimal 600 kata)

Pelaksanaan inovasi melibatkan banyak pihak dan melalui beberapa tahapan yaitu :

Tahap Persiapan:

1. **Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan**, dimulai pada bulan September 2016 dengan melakukan rapat pokja dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk penyamaan persepsi serta penyusunan rencana tindak lanjut.
2. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Tahap Pelaksanaan:

1. **Launching Program Amnesti Tangki Septik Bocor**, yang dilaksanakan saat Musrenbang Kabupaten dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah, Camat lingkup Kabupaten Muara Enim, Tokoh Masyarakat.
2. **Sosialisasi** program inovasi "Amnesti Tangki Septik Bocor Kabupaten Muara Enim" sebagai inovasi program sanitasi menuju universal akses air minum dan sanitasi 2019 serta peningkatan akses dan kualitas untuk layanan sanitasi berkelanjutan.
 - Sosialisasi tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mengundang Perangkat Daerah, Muspida, Baznas dan Ibu-Ibu PKK.
 - Sosialisasi tingkat Kecamatan dengan peserta Kepala Desa, Ibu-Ibu PKK, sanitarian, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Kader Posyandu.
 - Sosialisasi melalui media cetak dan radio Serasan yang disiarkan sebanyak 10 (sepuluh) kali sehari.
3. Penyusunan rancangan *database* sanitasi di Kabupaten Muara Enim dan zona prioritas yang akan menjadi dasar dalam pemberian subsidi penggantian tangki septik bocor dan penyedotan tinja gratis.
4. Pelatihan operator ASN dan kader kesehatan untuk melakukan survey penerima manfaat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,
5. Pelaksanaan survey penerima manfaat bagi seluruh rumah (*by name by address*) di 3 wilayah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas.
6. Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Kader Kesehatan dan ASN yang sebelumnya diberikan pelatihan. Pendataan dengan menggunakan kuesioner dilakukan Kader Kesehatan dan ASN melakukan pendataan di unit kerja masing-masing dengan menggunakan aplikasi android.
7. Implementasi terbatas dilakukan pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017 - 2019. Penentuan lokasi berdasarkan zona prioritas yaitu pada area yang memenuhi risiko sanitasi antara lain penurunan

kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan akibat rendahnya akses layanan sanitasi.

8. Diadakan rapat koordinasi pokja untuk penyamaan persepsi. Rapat pokja dilaksanakan pada awal tahun untuk pelaksanaan dan diadakan hampir setiap bulan untuk mengetahui *progress* di lapangan yang dihadiri OPD teknis, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan konsultan USDP.

5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? (Maksimal 300 kata)

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi ini yaitu:

1. Masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi target sasaran pelaksanaan inovasi.
2. Pemerintah daerah yang membentuk pokja air minum dan sanitasi. Pokja air minum dan sanitasi terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, BPKAD, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup semua bersinergis bekerja sesuai bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan inovasi.
3. USDP (*Urban Sanitation Development Program*), berperan sebagai konsultan dalam pelaksanaan inovasi dengan memberikan pendampingan dan bantuan teknis sehingga inovasi amnesti tangki septik bocor dapat terlaksana sesuai target.
4. Kader kesehatan, Bidan Desa, Aparatur Sipil Negara yang berperan melakukan pendataan tangki septik di setiap rumah tangga dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Desa, Lurah dan Camat berperan memantau pelaksanaan inovasi di wilayah masing-masing dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi dan bagaimana sumber daya tersebut dimobilisasi? (Maksimal 500 kata)

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi ini antara lain:

1. Sumber daya keuangan.

Sumber daya keuangan berasal dari:

- APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2017 sebesar 1,5 milyar digunakan untuk pengadaan tangki septik, biaya sosialisasi kepada perangkat daerah dan sosialisasi ditingkat Kecamatan, honor kader kesehatan yaitu Rp.5000,- per kuesioner. Biaya kampanye inovasi di media massa dan radio sebesar Rp. 186.944.000,-. Biaya pelatihan kader kesehatan sebesar Rp. 200.000.000,-
- APBDes Tahun 2017 sebesar Rp.75.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan WC umum di 15 (lima belas) desa.

2. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Perangkat Daerah terkait, konsultan USDP, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Bidan Desa.

3. Sumber daya lainnya

- Media cetak dan radio Serasan sebagai sarana kampanye inovasi.
- Penggunaan teknologi yaitu aplikasi berbasis android untuk melakukan pendataan kepemilikan tangki septik dan pengiriman data langsung ke server.

7. Apa saja keluaran (*output*) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi? (Maksimal 400 kata)

Keluaran kongkret yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi ini yaitu:

1. Ditetapkannya peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP). Sebagai perbandingan pada bulan Desember Tahun 2015 jumlah JSP sebanyak 14.928 JSP dan pada bulan Desember Tahun 2017 meningkat menjadi 16.449 JSP.
3. Dibangunnya tangki septik sebanyak 500 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 3 (tiga) Kecamatan.
4. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, akses jamban sehat, dan tersedianya tangki septik aman dari sebelumnya sebesar 61,13% menjadi 72,08% pada tahun 2017.
5. Meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m³/hari menjadi lebih dari 10 m³/hari yang diolah di IPLT sehingga aman dibuang ke lingkungan.

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi? (Maksimal 400 kata)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi dilaksanakan secara berjenjang yaitu:

1. Pada tingkat Desa/ Kelurahan pemantauan dan laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Camat sekurangngnya 3 bulan sekali.
2. Pemantauan dan laporan pelaksanaan tingkat Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda sekurangngnya 3 bulan sekali.
3. Pemantauan bersama OPD teknis melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman, Konsultan USDP, fasilitator lapangan yang melakukan monitoring setiap bulan untuk mengetahui kemajuan fisik di lapangan. Karena pelaksanaan inovasi bersifat *multi-stakeholder* dan terdiri dari berbagai Perangkat Daerah, maka Sekretaris Daerah memimpin proses monitoring dan evaluasi ini.
4. Evaluasi dilaksanakan oleh sekretariat yang berkedudukan di Bappeda. Evaluasi tahun sebelumnya dilakukan setiap awal tahun berjalan. Laporan pemantauan dan evaluasi kemudian disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan evaluasi ini akan menjadi bahan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? (Maksimal 300 kata)

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi antara lain:

1. Tidak adanya data awal yang valid mengenai rumah tangga yang termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR merupakan target sasaran inovasi yang akan mendapat bantuan penggantian tangki septik dan penyedotan tinja gratis. Permasalahan ini diatasi dengan melakukan pendataan yang melibatkan kader kesehatan dan ASN.
2. Harapan masyarakat yang cukup tinggi dimana mereka ingin Pemerintah Kabupaten tidak hanya membantu penggantian tangki septik tetapi juga dibantu dalam penyediaan jamban/ kloset karena harganya cukup mahal bagi MBR. Mengatasi permasalahan ini maka untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana penyediaan jamban/ kloset sehingga bantuan yang diberikan kepada MBR berupa 1 (satu) paket yaitu bantuan jamban/ kloset dan tangki septik.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jamban sehat. Masyarakat ingin semua pengerjaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Pemerintah Daerah ingin masyarakat turut bergotong royong dalam pelaksanaan inovasi ini. Hal ini diatasi dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat agar masyarakat mau bergotong royong dalam pembangunan jamban sehat dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sehingga mereka dapat bergotong royong memasang tangki septik juga dapat mandiri dalam pengelolaan air limbah domestik.
4. Implementasi program Pemerintah Kabupaten terkait akses universal (contoh: program air bersih dan sanitasi) belum tersinergi antar perangkat daerah sehingga bantuan yang diberikan tidak berada pada satu kawasan. Kendala ini diatasi dengan lebih sering melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

D. Dampak Sebelum dan Sesudah (25%)

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan oleh inovasi? (Maksimal 700 kata)

Manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini antara lain:

1. Berubahnya perilaku dan pola hidup masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan tangki septik sehat, dan kewajiban menguras tanki septik secara berkala.
3. Berkurangnya angka kesakitan diare di masyarakat miskin.
4. Berkurangnya pencemaran lingkungan. Bantuan yang diberikan kepada MBR berupa tangki septik berstandar SNI. Penggunaan tangki septik berstandar SNI dan penyedotan tinja berkala, secara efektif akan mengurangi pencemaran lingkungan.
5. Peningkatan capaian target *universal access*

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan? (Maksimal 700 kata)

Video : <https://youtu.be/9DJ6ymvqiDI>

No	Fokus Perubahan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1.	Perilaku dan pola hidup masyarakat	Masyarakat masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai dan kebun.	Masyarakat buang air besar di jamban sehat.
2.	Kepemilikan jamban sehat dan tangki septik aman	Masyarakat belum memiliki jamban sehat atau walaupun sudah memiliki jamban namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan disalurkan ke sungai).	Meningkatnya akses jamban sehat dan tangki septik aman di Kabupaten Muara Enim. Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diberikan subsidi 100% penggantian tangki septik.
3.	Frekuensi penyedotan tangki septik	Tidak jelas	Berkala (setiap 3-4 tahun sekali)
4.	Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Belum optimalnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dilakukan penyedotan lumpur tinja pada tangki septik masyarakat yang telah melaporkan untuk kemudian dibawa ke IPLT dan diolah agar memenuhi baku mutu dan aman dibuang ke lingkungan. Penyedotan tinja untuk masyarakat non MBR didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

12. Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? (Maksimal 300 kata)

Kegiatan yang dilaksanakan pada inovasi ini **selaras** dengan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 1** yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun khususnya target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Inovasi ini juga **selaras** dengan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 6** yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua khususnya target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Serta target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan bantuan penggantian tangki septik berstandar SNI dan penyedotan tinja gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mereka dapat menikmati akses sanitasi layak. Dengan adanya akses sanitasi layak kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat serta mencegah pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dan tanah. Masyarakat didorong untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pengelolaan air dan sanitasi di tempat tinggalnya.

E. Keberlanjutan (15%)

13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? (Maksimal 200 kata)

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan inovasi ini:

1. Masyarakat perlu dimotivasi dan diedukasi agar mau berpartisipasi untuk meningkatkan akses sanitasi layak.
2. Perlunya koordinasi dengan semua pihak yang terlibat sehingga tercipta komunikasi yang baik dan sinergitas dalam pelaksanaan inovasi.
3. Perlunya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah untuk menjadikan peningkatan akses sanitasi layak sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Rekomendasi:

Pada pelaksanaan program selanjutnya perlu dilakukan peninjauan kerjasama dengan TNI AD yang juga memiliki program sejuta jamban sehingga dapat disinergiskan dengan inovasi amnesti tangki septik bocor.

14. Apakah inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan dan direplikasi? (Maksimal 500 kata)

Inovasi ini akan berkelanjutan denganditerbitkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan. Selain itu saat ini sedang dibahas Raperda mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) sebagai payung hukum pelaksanaan program ini.

Secara kelembagaan, pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Dinas PUPR selaku regulator dan UPTD Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) selaku operator penyedotan lumpur tinja dan pengelolaan IPLT.

Lokasi pelaksanaan inovasi pada tahun 2018 diperluas dari 3 Kecamatan pada tahun 2017 menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, dan Kecamatan Gunung Megang.

Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan APBD Tahun 2018 sebesar 15 milyar rupiah yang akan digunakan untuk pengadaan jamban/ kloset, tangki septik aman dan

penyedotan tinja gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana ini akan digunakan untuk membangun 3.000 unit jamban dan tangki septik bagi MBR.

Selain itu telah ditandatangani MoU antara Pemerintah Daerah Muara Enim dengan Baznas yaitu untuk tahun 2018 Baznas akan memberikan bantuan berupa 100 unit jamban sehat dengan nilai Rp. 3.400.000,- per unit. Saat ini telah direalisasikan pembangunan tahap awal sebanyak 5 unit jamban sehat. PT. Bukit Asam juga telah berkomitmen untuk membantu pelaksanaan inovasi melalui Dana CSR.

Pengelolaan IPLT yang sebelumnya oleh UPTD Persampahan di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup, saat ini sudah dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan mengelola IPLT.

Hal-hal yang dapat direplikasi dari inovasi ini antara lain:

1. Melakukan pendataan yang melibatkan unsur masyarakat sehingga dapat diperoleh data penerima bantuan yang valid.
2. Memberikan *reward* berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu renovasi tangki septik dan penyedotan tinja gratis.
3. Pembiayaan pelaksanaan inovasi dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBDes, Lembaga Keagamaan, maupun dari sektor swasta.
4. Pembentukan pokja sanitasi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar pihak.

Kepala Bappeda pernah menjadi narasumber dalam kegiatan advokasi dan promosi sanitasi yang diselenggarakan oleh Bappenas dan dihadiri oleh Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera dan Jawa. Selain itu Kepala Bappeda juga pernah menjadi narasumber dalam konferensi sanitasi dan air minum nasional tahun 2017 untuk berbagi pengalaman mengejar target akses universal 100-0-100. Pada tahun 2017 Kota Tangerang Selatan dan Kota Bogor melakukan studi banding mengenai sanitasi ke Kabupaten Muara Enim. Sehingga sangat mungkin ada daerah lain yang mereplikasi beberapa hal dari inovasi amnesti tangki septik bocor.